

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlangsungnya reformasi pada Tahun 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru, telah membuka peluang pelaksanaan Pemilihan umum (Pemilu) yang jujur dan adil. Makna penting dari pelaksanaan pemilu itu sendiri bagi negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia adalah sebagai institusi untuk melakukan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma dan etika sehingga sirkulasi (pergantian kekuasaan) dapat dilakukan secara teratur sesuai dengan sistem demokrasi.¹ Hal inilah yang belum terlaksana pada pemilu-pemilu dimasa pemerintahan Orde Baru. Pemilu pada masa Orde Baru tersebut sarat dengan manipulasi. Pemilu pada masa ini juga dijadikan alat legitimasi penguasa, dimana proses dan struktur Pemilu dibuat sedemikian rupa, sehingga hampir mustahil untuk memunculkan wakil-wakil rakyat yang dapat menyalurkan aspirasi warga negara.²

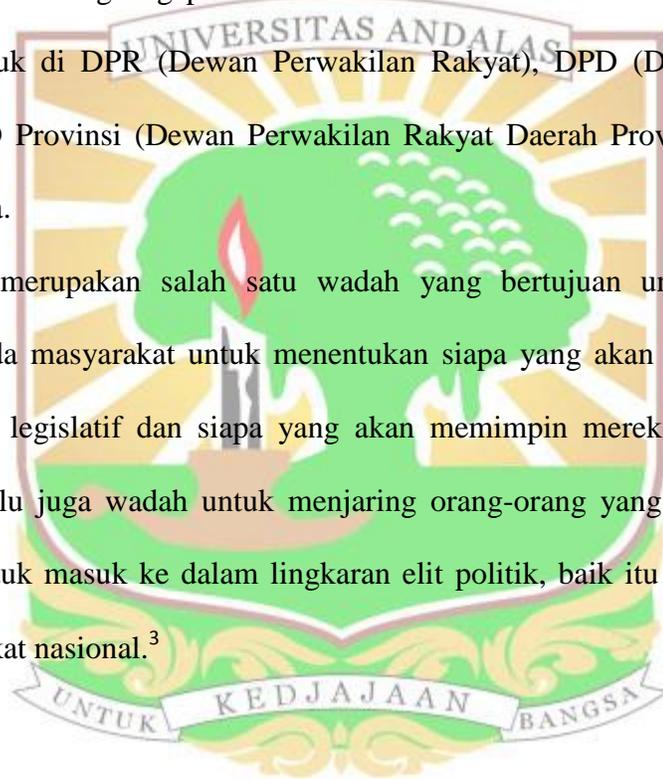
Perubahan pada pelaksanaan Pemilu mulai dirasakan dalam era reformasi dimulai pada Tahun 1999. Pemilu pada masa ini menggunakan sistem proporsional

¹Koirudin, *Profil Pemilu 2004 (Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hal.187.

²Muhammmad Hikam *Politik Kewarganegaraan Landasan Redemokratisasi Di Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 1999, hal. 129.

daftar tertutup. Pada sistem ini masyarakat hanya mencoblos tanda partai dan partai yang nantinya menentukan orang-orang yang akan ditempatkan sebagai wakil rakyat. Perubahan sistem Pemilu yang sangat berarti terjadi pada Pemilu Tahun 2004, dimana selain mencoblos tanda partai masyarakat juga dapat mencoblos tanda gambar dari calon yang akan dipilihnya. Maka dengan sistem ini rakyat dapat menentukan secara langsung pemilih untuk menentukan secara langsung wakilnya yang akan duduk di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPRD Provinsi (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi), dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pemilu merupakan salah satu wadah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam lembaga legislatif dan siapa yang akan memimpin mereka dalam lembaga eksekutif. Pemilu juga wadah untuk menjaring orang-orang yang benar-benar bisa dan mampu untuk masuk ke dalam lingkaran elit politik, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.³



Perubahan sitem pemilu Pada sistem Pemilu Tahun 2009 ada perubahan aturan main pemilu yang sangat strategis yaitu perubahan aturan penentuan tentang penetapan calon legislatif yang berhak duduk di lembaga legislatif. Bila pada tahun 2004 menggunakan sistem nomor urut, tetapi pada pemilu legislatif tahun 2009

³Lucianus Taelagat, *Perilaku memilih (Voting Behavior) Masyarakat Mentawai Pada Pemilu Legislatif 2004*. Skripsi S1 Pada Sarjana Ilmu Politik, Universitas Andalas, 2006.hlm.1.

aturan itu terkoreksi dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 22-24/PUU-VI/2008 tentang penentuan yang berhak duduk di Lembaga Legislatif adalah yang mendapat suara terbanyak.

Dalam konteks perwakilan politik, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut sangat strategis. Diharapkan dengan sistem itu, wakil akan bertindak dalam rangka bereaksi pada kepentingan terwakil, karena pemilih atau rakyat saling mengenal. Terwakil menjadi pihak yang memberi mandat dan wakil mempunyai wewenang untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang telah disepakati dengan terwakil. Relasi dan interaksi yang terbangun antara keduanya mempunyai nilai yang sangat strategis dan penting.⁴

Keputusan ini pun sangat disambut gembira oleh calon-calon legislatif, khususnya mereka yang tidak berada di nomor urut jadi. Akan tetapi kondisi ini bukan tidak menyisakan kondisi yang bersifat konfliktual. Keputusan ini menjadikan adanya persaingan yang sengit, baik calon legislatif antar partai politik maupun di dalam tubuh partai politik itu sendiri. Pada posisi ini, masing-masing calon mengeluarkan kemampuan, strategi dan sumber daya yang dimiliki untuk bersaing guna memperoleh suara terbanyak di daerah pemilihannya. Komunikasi politik dan strategi kampanye calon legislatif menjadi sangat penting posisinya agar mereka bisa merebut hati rakyat.

⁴Sonnas Septiadi, *Bentuk Komunikasi Politik Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Konstituen Di Daerah Pemilihannya*, Skripsi S1 Pada Sarjana Ilmu Politik, Universitas Andalas, 2007.

Perubahan mekanisme pemilu legislatif tersebut telah membuka ruang kesempatan yang luas kepada seluruh warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam politik. Partisipasi politik tersebut tidak hanya berjalan dalam bentuk pemberian hak suara, melainkan adanya antusiasme warga yang mendaftarkan diri sebagai kontestan di pemilu. Jika mencermati prosedur maupun proses pemilihan di dalam pemilu secara langsung, kita bisa menggambarkan bahwa kontestasi itu ibarat balapan mobil. Calon anggota legislatif itu berkemungkinan memenangkan pemilu secara langsung apabila memiliki tiga kombinasi dalam berkendara, yakni adanya mobil yang baik, sopir yang piawai, dan bensin yang memadai. Secara konseptual metafora itu terwujud dari tiga modal utama yang dimiliki oleh para calon yang akan mengikuti kontestasi dalam pemilu. Ketiga modal itu adalah modal politik (*political capital*), modal sosial (*social capital*) dan modal ekonomi (*economic capital*). Ketiga modal ini dapat mempengaruhi seorang kandidat dalam memperoleh dukungan dari masyarakat. Semakin besar akumulasi modal yang dimiliki oleh seorang kandidat maka semakin besar pada dukungan yang diperoleh.⁵

Dalam arena kontestasi politik dengan kompetisi antar kandidat dan kemenangan ditentukan suara terbanyak oleh pemilih kompetisi yang terjadi di pengaruhi oleh kapasitas figur masing-masing kandidat. Figur kandidat tersebut seperti ketokohan, popularitas dan moralitas. Latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Hal ini dapat menjadi sangat penting dalam suatu kontestasi, dimana

⁵Kacung Maridjan, Demokratisasi di daerah, pelajaran dari pilkada secara langsung, Pustaka Eureka, Surabaya, 2006 Hal 89.

seseorang hanya dengan mengandalkan popularitas dan figur mampu bersaing dalam pemilu. Modal ini adalah bangunan relasi dan kepercayaan (*trust*) yang dimiliki oleh kandidat dengan masyarakat yang akan memilihnya.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan sistem demokrasi dalam artian pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, maka Indonesia mempunyai lembaga perwakilan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD. Adanya lembaga tersebut merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat sebagai pemegang kekuasaan tinggi di Indonesia. Maka dari itu setiap daerah yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) diwajibkan untuk melaksanakan pesta Demokrasi yang di lakukan 1 kali dalam lima tahun tersebut untuk memilih pemimpin yang akan mewakili setiap aspirasi dari masyarakat.

Sebagaimana halnya daerah lain di Indonesia, pada pemilihan tahun 2009 penyelenggaraan pemilu legislatif DPRD Kota Bukittinggi. Beberapa muka baru bermunculan dalam pemilu legislatif DPRD Kota Bukittinggi untuk mendapatkan kursi dan mewakili aspirasi dari masyarakat.

Tabel 1.1
Anggota DPRD Terpilih Kota Bukittinggi Periode 2009-2014

NO	NAMA ANGGOTA DPRD TERPILIH	PARTAI
1.	Alfianus	HANURA
2.	Mukhsin	GERINDA
3.	Parjono	PKPI

4.	Darwin	PKS
5.	Syahrul	PKS
6.	M.Nur Indris	PAN
7.	Fauzan Hafis	PAN
8.	Kamsril	GOLKAR
9.	M. Syukri	GOLKAR
10.	Uneva Haryanto	PPP
11.	Dewi Angraini	PPP
12.	Usmar Marlen	PBB
13.	Rahmad Haris	DEMOKRAT
14.	Maderizal	DEMOKRAT
15.	Hasrida	DEMOKRAT
16.	Syafrudin Djas	DEMOKRAT
17.	Nursyda	DEMOKRAT
18.	Marjiz	DEMOKRAT
19.	Yon Trimansyah	DEMOKRAT
20.	Aisyah	DEMOKRAT
21.	Arma	HANURA
22.	Ibnu aziz	PKS
23.	Ridha	PAN
24.	Jusra Adek	GOLKAR
25.	Syharil Mukhtar	PPP

Sumber: KPU Kota Bukittinggi

Dari data diatas terlihat perolehan kursi di DPRD Kota Bukittinggi terbanyak adalah kader-kader dari Partai Demokrat lebih mendominasi pada Pemilu legislatif DPRD Kota Bukittinggi pada tahun 2009 yang memperoleh 8 kursi. Kemudian kader dari Partai Gerindra hanya mendapatkan 1 kursi yaitu Mukhsin di DPRD Kota Bukittinggi.

Pemilihan umum, yang memiliki tugas dan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemilihan adalah komisi pemilihan umum (KPU). Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan lembaga atau badan yang mandiri dan terpisah dari cabang kekuasaan negara yang ada seperti Yudikatif, Legislatif, dan Eksekutif, yang bertugas

mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan⁶. Hasilnya, pada penyelenggaraan Pemilu legislatif DPRD tepat pada tanggal 9 April 2014 di Kota Bukittinggi komposisi perolehan kursi di DPRD mengalami perubahan dibandingkan Pemilu Tahun 2009. Berdasarkan penyelenggaraan pemilu legislatif DPRD Kota Bukittinggi tahun 2014, ada beberapa fenomena yang menarik untuk dapat diperhatikan dengan seksama dalam komposisi perolehan kursi di DPRD Kota Bukittinggi.

Pada pemilu legislatif DPRD Kota Bukittinggi tahun 2014 yang telah diselenggarakan adanya perubahan perolehan kursi yang didapatkan oleh Anggota Partai Gerindra. Pada Pemilu tahun 2009 caleg dari Partai Gerindra hanya mendapatkan 1 kursi dan pemilu tahun 2014 caleg Partai Gerindra mendapatkan 4 kursi dari 3 dapil yang ada di Kota Bukittinggi. Pada saat penyelenggaraan Pemilu legislatif DPRD Kota Bukittinggi ada 120 orang calon legislatif yang berkompetisi dalam memperebutkan 25 kursi DPRD. Dalam pemilu legislatif DPRD itu Partai Gerindra mengusung anggotanya sebanyak 25 orang yang ada di beberapa Dapil di Kota Bukittinggi. Berikut tabel yang menunjukkan caleg terpilih dari Partai Gerindra di beberapa Dapil di Kota Bukittinggi.

Tabel 1.2
Daftar Perolehan Kursi Parpol dan Calon Terpilih
Anggota DPRD Kota Bukittinggi
Pemilu 2014

⁶Abdullah Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56

No	Partai Politik	Jumlah Kursi	Calon Terpilih	Dapil
1.	Partai NasDem	1	Asril, SE	Bukittinggi I
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	Andre Kresna Saputra	Bukittinggi II
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	Ibnu Aziz Arnis H. Syaiful Efendi, Lc	Bukittinggi I Bukittinggi II Bukittinggi III
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	1	Parale Sijabat, SH	Bukittinggi III
5.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	4	Jusra, S.Sos., MM H. Trismon, SH Edison, SE Jon Edwar, SE	Bukittinggi I Bukittinggi II Bukittinggi II Bukittinggi III
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	4	Asri Bakar, SH Deddi Moeis Herman Syofyan Benny Yusrial, S.IP	Bukittinggi I Bukittinggi I Bukittinggi II Bukittinggi III
7.	Partai Demokrat	4	Rusdy Nurman, A.Md Yontrimansyah, SE Ir. Hj. AisyahHj. Nursyida, A.Ma., Pd	Bukittinggi I Bukittinggi I Bukittinggi II Bukittinggi III
8.		3		

Partai Amanat Nasional (PAN)		M. Syafri Syam Muhammad Nur Idris, SH Fauzan Haviz	Bukittinggi I Bukittinggi II Bukittinggi III
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	Dedi Fatria, SH Uneva Hariyanto, SH Drs. Rismaidi, SH	Bukittinggi I Bukittinggi II Bukittinggi III
10. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1	Zulius St. Rajo Alam	Bukittinggi I

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU D) Kota Bukittinggi

Dinamika politik dan perubahan peta politik lokal menjadi alasan yang cukup kuat untuk menjelaskan perubahan komposisi kursi DPRD Kota Bukittinggi. Pada Pemilu legislatif Tanggal 9 April tahun 2014, caleg dari Partai Gerindra dapat merebut 4 kursi dari 3 dapil. Dapil 1 mendapatkan 2 kursi, Dapil 2 mendapatkan 1 kursi, dan Dapil 3 mendapatkan 1 kursi. Berikut tabel yang menunjukkan nama-nama calon legislatif terpilih dan perolehan suara dari Partai Gerindra.

Tabel 1.3
Daftar Calon Legislatif Terpilih Partai Gerindra Dalam Pemilihan Umum Legislatif Kota Bukittinggi Tahun 2014

No.	Nama Calon Legislatif Terpilih	Dapil	Suara Sah
1.	Asri Bakar, SH	I	579 Suara
2.	Deddi Moeis	I	527 Suara
3.	Herman Syofyan, SE	II	396 Suara
4.	Beni Yusrial, S.IP	III	962 Suara

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU D) Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel di atas calon legislatif terpilih dari Partai Gerindra memperoleh 4 kursi dalam Pemilu Legislatif DPRD Kota Bukittinggi tahun 2014, di antara para calon legislatif terpilih dari Partai Gerindra tersebut ada satu nama yang sangat menarik perhatian peneliti yaitu Beny Yusrial mendapatkan suara terbanyak dibandingkan dengan calon legislatif terpilih dari Partai Gerindra lainnya. Beny Yusrial merupakan salah satu calon legislatif terpilih dari Partai Gerindra yang berusia muda yaitu 37 tahun bila dibandingkan dengan calon legislatif terpilih dari Partai Gerindra lainnya. dalam pemilihan umum legislatif DPRD Kota Bukittinggi yang telah di selenggarakan Beny Yusrial memperoleh suara terbanyak di bandingkan calon legislatif terpilih dari Partai Gerindra lainnya. Berikut rincian perolehan suara perkelurahan dari Beny Yusrial.

Tabel 1.4
Rincian Perolehann Suara Beny Yusrial Perkelurahan Pada Dapil III
Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh (ABTB) Pemilihan Umum Legislatif DPRD
tahun 2014

Nama Calon	Aur Kuning	Birugo	Belakang Balok	Sapiran	Kubu Tanjung	Pakan Labuah	Parit Antang	Lading Cakiah	Jumlah
Beny Yusrial	398	200	24	49	60	37	7	14	962 Suara

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU D) Kota Bukittinggi

Dari tabel di atas perolehan suara Beny Yusrial terbanyak itu adalah di Kelurahan Aua Kuning 398 suara dan Kelurahan Birugo 200 suara dengan menempatkan Beny Yusrial menjadi anggota legislatif terpilih dan memperoleh suara terbanyak dari anggota legislatif terpilih dari Partai Gerindra lainnya di lembaga legislatif DPRD Kota Bukittinggi. Bila di identifikasi dari modal politik yang di

miliki oleh Beny Yusrial tidak terlalu mendominasi dari caleg terpilih dari Partai Gerindra lainnya. dari segi *track record* politik dan pemerintahan dari keseluruhan para calon legislatif terpilih dari Partai Gerindra pemilu legislatif tahun 2014, merupakan wajah-wajah yang tidak asing lagi dalam dunia politik dan pemerintahan lokal Kota Bukittinggi. Beny Yusrial bukanlah kandidat yang mendominasi jika kita lakukan identifikasi terhadap *track record* politik dan pemerintahan. Asri Bakar adalah kandidat yang bisa dikategorikan sebagai yang mendominasi dalam pengalaman politik dan pemerintahan, terutama dalam jabatan politik. Asri Bakar bila dilihat kepada *track record* yang dimilikinya telah pernah menjadi Pembina kepegawaian, kepala bagian Humas Pemda, pemeriksa Kota Bukittinggi, Kepala Dinas Humas, Kepala Dinas Tibum Kota Bukittinggi, Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, Kepala Dinas Inspektorat, Kepala Dinas Pengawasan Perusahaan dan Ketenagakerjaan Kota Bukittinggi dan Kepala Dinas Perhubungan Bukittinggi.⁷ Pengalaman-pengalaman yang berhaluan kepada peningkatan kualitas manusia masing-masing calon anggota legislatif terpilih dari Partai Gerindra pada tahun 2014 juga tidak ada yang mendominasi, termasuk Beny Yusrial yang memperoleh suara terbanyak, kalau melakukan identifikasi dari segi latar belakang pendidikan. Asri Bakar dan Herman Sofyan merupakan calon anggota legislatif terpilih Kota Bukittinggi yang mempunyai latar belakang pendidikan sampai pada tingkat akademis lulusan (S1), Abdul Moeis yang tidak mempunyai gelar dalam bidang akademis, sedangkan Beny Yusrial lulusan sarjana (S1),

⁷Profil calon legislatif DPRD Kota Bukittinggi (data KPUD Kota Bukittinggi)

Pengalaman organisasi juga merupakan akses peningkatan kualitas manusia. Bila melihat pengalaman organisasi dari anggota legislatif dari Partai Gerindra, Beny Yusrial juga tidak mendominasi, bila diidentifikasi kepada masing-masing anggota legislatif Partai Gerindra terpilih lainnya Asri Bakar merupakan organisatoris yang berpengalaman. Kemudian bila di lihat dari pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) yang telah pernah ikuti kepada masing-masing calon anggota terpilih dari Partai Gerindra, Beny Yusrial tidak memiliki rekam jejak yang tidak berarti karena bila di lihat dari data yang telampir yang mendominasi dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan ialah Asri Bakar dan Herman Sofyan.⁸ Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan keterampilan dan sikap dari individu tersebut.

Dilihat dari perspektif budaya, Beny Yusrial juga tidak terlalu mendominasi dari anggota terpilih lainnya dari Partai Gerindra, bila diidentifikasi kepada anggota terpilih dari Partai Gerindra Herman Sofyan yang mendominasi karena mempunyai gelar adat yaitu datuak dari Suku Guci dengan nama gelar Herman Sofyan datuak Sidi Bandaro. Gelar datuak yang diterima oleh seseorang merupakan pemimpin dari suatu kaum. Herman Sofyan yang menjabat sebagai sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Bukittinggi mengatakan beberapa hal tentang Beny Yusrial. Dikutip dari Republika News “Herman Sofyan yang menjabat sebagai Ketua OKK, Ketua Bapilu dan Ketua Pemenangan Internal Partai untuk pemenangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2014-2019 dan sekaligus selaku ketua DPC Partai Gerindra Kota Bukittinggi

⁸*Ibid.* lihat lampiran 7

mengatakan beberapa hal tentang Beny Yusrial. Beny baru bergabung dengan Partai Gerindra hanya 5 bulan sebelum perekrutan pencalegan periode 2014-2019, Beny tidak termasuk ke dalam struktural kepengurusan DPC Partai Gerindra Kota Bukittinggi, belum pernah berbuat untuk membesarkan Partai Gerindra, Beny Yusrial belum pernah berkiprah dalam dunia politik, ketokohan dan kepomoran belum di miliki di samping belum adanya berbuat untuk Kota Bukittinggi tentunya”.⁹ Dari berita di atas dapat di lihat ada beberapa kekurangan Beny Yusrial menjadi ketua DPRD Kota Bukittinggi.

Pemilu merupakan arena politik nyata dalam wajah Demokrasi di Indonesia, di mana pada penyelenggaraan pemilu banyak aktor yang terlibat di dalamnya. Para kandidat berupaya untuk merebut hati dari para pemilih, selain dari modal ekonomi terdapat modal lain yang harus di miliki oleh para kandidat. Ketokohan dari seorang kandidat juga dapat mempengaruhi masyarakat. Pendekatan psikologis dalam teori perilaku memilih (*voting behavior*) menjadi argumentasi peneliti melihat permasalahan di atas. Kecenderungan pemilih adalah memperhatikan kedudukan kontestan pemilu dalam masyarakat dalam membangun sikap, persepsi dan orientasi politik. Studi Liddle dan Mujani¹⁰ menyimpulkan faktor ketokohan menjadi tulang punggung untuk meraih suara. Sedangkan dari data terlampir bisa ditarik kesimpulan bahwa Beny Yusrial kalau dilihat dari pengalamannya masih ketinggalan

⁹ Diakses dari website <http://Republiknews.com/wakil-ketua-dpc-gerindra-bukittinggi-pertanyakan-penetapan-beny-sebagai-ketua-dprd/> pada tanggal 3 Desember pukul 20:34 wib.

¹⁰Syaiful Mujani. and William R Liddle. Personalities, Parties and Voters. *Journal of Democracy* Volume 21,number 2 April 2010. National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press.

ketokohnya dari caleg terpilih dari Partai Gerindra lainnya. Beny Yusrial adalah salah satu kontestan dalam pemilu legislatif DPRD Kota Bukittinggi yang telah dilaksanakan, Beny Yusrial yang baru bergabung dengan Partai Gerindra pada bulan Januari 2014 sebelum diselenggarakannya pemilu menjadi populer di hati masyarakat dengan memperoleh suara terbanyak dan mendominasi dari anggota legislatif terpilih lainnya dari Partai Gerindra.

Berangkat dari permasalahan di atas pada tanggal 9 April 2014 Pemilu Legislatif DPRD yang telah diselenggarakan, kader Partai Gerindra memperoleh 4 kursi di lembaga legislatif DPRD Kota Bukittinggi. Dalam pemilu tersebut Beny Yusrial memperoleh suara terbanyak dari ketiga calon legislatif terpilih dari Partai Gerindra dianggap lebih senior dan lebih mendominasi dalam kepemilikan modal politik dari Beny Yusrial . Dengan modal politik yang tidak terlalu mendominasi dibandingkan dengan anggota legislatif terpilih lainnya, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Modal Politik Beny Yusrial dalam Pemilihan Umum Legislatif DPRD Kota Bukittinggi pada tahun 2014 ?

